

PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI KECIL MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN TERING KABUPATEN KUTAI BARAT

Juardi¹, Masjaya², Djumadi³

Abstract

The findings in the research object shows that the development of small industry through community empowerment in Sub-district Tering and District west Kutai can bring change, but it can be seen from the enterprise's change done by empowered small industrial enterprise actors who have experienced enhancement both in terms of investment, production factor as well as other business. Factually, for the most part of the small industrial enterprise actors who received business capital injection can develop well. In essence, the development of small industrial business conducted through several parameters set having implications for the business development of small industry in Sub-district Tering. The role of local government to support small industrial's development is very large in its contribution. Primarily, toward business capital injection, the small industrial business actors feel helped. The less of the optimal result reached in developing small industry through empowering community in Sub-district Tering District West Kutai caused by many factors, such as the limitation of supporting factor like production tool, enterprise capital, and structural's regulation and institutional system. Other factors which cause the decrease of the optimal result of developing small industry caused by the limited skilled labor in industrial sector and the ineffective institution builder in carrying out its function as information media.

Keywords: Home Industries, Society Empowerment.

Abstrak

Hasil temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan industri kecil melalui pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat dapat membawa perubahan yang berarti terhadap pelaku usaha industri kecil. Meskipun secara empirik dapat membawa perubahan, tetapi perubahan tersebut belum signifikan, Hal tersebut dapat diketahui dari

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

perubahan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha industri kecil yang diberdayakan telah mengalami peningkatan, baik dari segi investasi, faktor produksi maupun usahan lainnya. Secara faktual, sebagian besar pelaku usaha industri kecil yang mendapat suntikan modal usaha dapat berkembang dengan baik. Pada intinya pengembangan usaha nindustri kecil yang dilakukan melalui beberapa parameter yang ditetapkan berimplikasi terhadap pengembangan usaha industri kecil di Kecamatan Teris. Peran pemerintah kabupaten untuk mendukung pengembangan industri kecil sangat besar kontribusinya, terutama melalui suntikan modal usaha justru para pelaku usaha industri kecil merasa terbantu. Kurang optimalnya hasil yang dicapai dalam mengembangkan industri kecil melalui pemberdayaan masyarakat di Kecamatan tering Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh beberapa factor, antara lain terbatasnya faktor pendukung seperti sarana produksi, modal usaha/kerja, dan penataan struktur serta sistem kelembagaan. Faktor lain yang menyebabkan kurang optimalnya hasil pengembangan industri kecil disebabkan terbatasnya tenaga terampil di bidang industri, kurang efektifnya lembaga pembina dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi.

Kata Kunci : Industri Kecil, Pemberdayaan masyarakat

Pendahuluan

Dalam Kontek pembangunan ekonomi bahwa, usaha Industri kecil memiliki peranan penting. Selain berfungsi sebagai penangkal krisis dan menjadi katup pengaman (savety belt) bagi masalah-masalah sosial ekonomi seperti penyediaan peluang kerja, penampung terakhir tenaga-tenaga kerja yang terkena PHK. Memperhatikan peranannya yg begitu besar maka sudah selayaknya mendapat perhatian dan perlindungan serta perlu diberdayakan secara optimal sehingga mampu meningkatkan daya saing di segmen pasar.

Ironisnya, undustri kecil di objek penelitian kurang mendapat perhatian dan kurang diberdayakan secara optimal sehingga kurang mampu meningkatkan daya saing dan dalam perkembangannya justru banyak industri kecil di daerah tersebut mengalami kebangkrutan.

Mencermati permasalahan tersebut, maka perlunya dilakukan pemberdayaan, baik melalui Pelatihan keterampilan kepada pelaku usaha industri kecil.. Pelatihan mengenai pemanfaatan fasiilitas kerja, dan Pelatihan mengenai pemanfaatan modal kerja. Perlunya pemberdayaan dimaksud, mengingat belum semua pelaku industri kecil di Kecamatan Tering memiliki kompetensi untuk mendukung pengembangan industri kecil. Padahal di daerah tersebut memiliki sumber daya industri yang potensial, karena kurang didukung dengan tenaga yang profesional maka sumber daya industri yang besar justru kurang memberikan nilai manfaat terhadap pelaku usaha industri kecil.

Bedasarkan permasalahan tsb, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam, agar dapat diketahui secara jelas mengenai fenomena yang berkenaan

dengan pemberdayaan yang dilakukan pemerintah Kecamatan Tering dalam rangka pengembangan industri kecil

Pengembangan Usaha Industri Kecil

Pengembangan merupakan suatu perubahan yang terencana atas sesuatu yang lebih baik. Menurut Mc Gill (2001 : 69) pengembangan merupakan suatu perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sedangkan Sudarmayanti (2001 :26) mengatakan bahwa pengembangan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memperbaiki kerah yang lebih baik.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan suatu perubahan yang dilakukan secara terencana untuk memperbaiki dan meningkatkan suatu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Jika dari beberapa pendapat diatas, jika dikaitkan dengan usaha industri kecil, artinya pengembangan dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan hasil usaha industri kecil ke arah yang lebih baik.

Sedangkan menurut Hasibuan, (2001 :68), pengembangan diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan usaha, baik yang dilakukan seacar perorangan maupun kolektif, yang diarahkan adanya perubahan yang lebih baik. Pengembangan bisa digunakan sebagai pembangun rasa atau memperkuat keyakinan untuk mencapai hasil sesuai tujuan yang diharapkan, yaitu untuk memperoleh keuntungan dalam rangka mempertahankan eksistensi usaha nyang telah ditekuninya.

Pengertian Pengembangan

Pengembangan merupakan suatu perubahan yang terencana atas sesuatu yang lebih baik. Menurut Mc Gill (2001 : 69) pengembangan merupakan suatu perubahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sedangkan Sudarmayanti (2001 :26) mengatakan bahwa pengembangan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk memperbaiki kerah yang lebih baik.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan suatu perubahan yang dilakukan secara terencana untuk memperbaiki dan meningkatkan suatu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Jika dari beberapa pendapat diatas, jika dikaitkan dengan usaha industri kecil, artinya pengembangan dimaksud sebagai upaya untuk meningkatkan hasil usaha industri kecil ke arah yang lebih baik

Sedangkan menurut Hasibuan, (2001 :68), pengembangan diartikan sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan usaha, baik yang dilakukan seacar perorangan maupun kolektif, yang diarahkan adanya perubahan yang lebih baik.

Pendapat yang berbeda dikemukakan Kast (dalam Thona, 2002 : 28 bahwa pengembangan mengacu pada suatu perubahan antara sebelum dan sesudah mengenai dari segala usaha yang dilakukan, baik secara kelembagaan maupun perorangan, mengindikasi lebih baik.

Pendapat lain dikemukakan oleh Jan Bella (dalam Flippo, 1994 : 93) bahwa pengembangan suatu usaha yang dilakukan untuk mening-katnya sesuatu, atau ada perubahan yang lebih baik daripada sebelum-nya. pengembangan suatu proses yang tidak ternilai ketika organisasi ingin memperkenalkan metode-metode kerja yang fleksibel dan ingin menciptakan sikap-sikap karyawan yang sesuai untuk menghadapi perubahan. Pengembangan bisa digunakan sebagai pembangun rasa atau memperkuat keyakinan untuk mencapai hasil sesuai tujuan yang diharapkan, yaitu untuk memperoleh keuntungan dalam rangka memper-tahankan eksistensi usaha nyang telah ditekuninya.

Konsep Usaha Industri Kecil

Usaha industri kecil (mikro) sesungguhnya sudah ada sejak pemerintah Orde Baru, dan usaha tersebut dirumuskan dalam kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam perkembangannya sering terbentuk dengan masalah modal maka dengan keterbatasan yang dimiliki terutama modal usahan, sehingga sulit untuk berkembang. Agra usaha tersebut maka perlu suntikan modal usaha dan ditunjang dengan faktor sarana dan prasarana yang memadai. Disamping itu diperlukan kemudahan-kemudahan yang mendorong berkembangnya usaha tersebut. Misalnya dalam penyederhanaan per-izinan memperoleh modal usaha dan kesempatan usaha, juga kemudahan dalam mendapat kesempatan mengikuti pelatihan. Untuk mewujudkan akses (kemudahan) bagi pengusaha usaha industri kecil, maka pihak pemerintah memberikan modal usaha, dan memberikan pelatihan (*Achievement Motivation Training*) bertujuan untuk meningkatkan kecakapan, dan keterampilan pelaku usaha, dan memberikan perlindungan kepada pengusaha industri kecil. Tindakan lain yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Barat adalah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Barat Nomor 412.32/K/1147/2013 tentang Alokasi Modal Usaha Ekonomi Mikro. Atas dasar kebijakan tersebut diharapkan para pelaku usaha industri kecil di Kabupaten Kutai Barat pada umumnya dan Kecamatan Tering khususnya, dapat berkebang sesuai yang diharapkan masyarakat.. Dalam hal ini yang dimaksud usaha industri kecil adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya. Sedang-kan pengertian industri yang dikaitkan dengan proses pengolahan dan pengembangan industri yang digunakan sebagai dasar acuan dari pada Departemen Perindustrian, yaitu : industri adalah rangkaian kegiatan dan ekonomi yang meliputi pengolahan, pengerjaan, pengubahan, perbaikan bahan baku atau barang setengah jadi menjadi barang yang berguna dan lebih bermanfaat untuk pemakaian.

Ditinjau dari kontribusinya bukan hanya l sebagai pilar utama untuk pemba-ngunan ekonomi kerakyatan. Tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, Oleh karena itu sudah selayaknya jika usaha industri kecil perlu

mendapat dukungan, perlindungan dan pengembangannya sehingga dapat berkembang.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah konsep yang lebih ditujukan pada keadaan psikologi individu dalam artian pemilikan sendiri, aktualitas sendiri atau rasa percaya diri yang diimplementasikan dalam kemampuan pengetahuan, ketrampilan dan pemilikan daya dalam menghadapi beberapa obyek. Suatu organisasi dapat dikatakan “berdaya” apabila mampu menciptakan kondisi yang membuat individu-individu di dalamnya dapat memperoleh ketrampilan, pengetahuan dan berbagai sumber daya yang dibutuhkan sehingga tujuan individu maupun tujuan organisasi dapat tercapai. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Pranaka, mendefinisikan *empowerment* pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemasnusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural baik didalam kehidupan keluarga, masyarakat, Negara, regional, internasional maupun dalam bidang politik, ekonomi, dan lain-lain (dalam Priyono, (1999 :15).

Sedangkan menurut Bryant dan White (1987:33) pemberdayaan adalah pertumbuhan kekuasaan dan wewenang untuk bertindak yang lebih besar kepada si miskin. Pemberdayaan adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberikan pada orang tersebut kebebasan untuk mempertanggung jawabkan idenya, keputusannya dan tindakannya (Cook dan Maucauly, 1997:113). Frire, sebagaimana dikutip Soetrino (1995:33) mengatakan bahwa pemberdayaan bukan hanya sekedar memberi kesempatan rakyat untuk menggunakan sumber alam dan dana pembangunan, akan tetapi merupakan upaya untuk mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang ada.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu konsep pembangunan masyarakat dalam bidang ekonomi dan politik yang bercirikan *people centered*, *participatory*, *empowering* dan *sustainable*. Asumsi dasar bahwa setiap manusia memiliki potensi, memiliki daya untuk mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, karena itu perlu diberdayakan agar dapat ditingkatkan keberdayaan dirinya.

Menurut Kartasasmita (1999 : 162), bahwa upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga arah yaitu 1). Menciptakan iklim/suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), 2). Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) dan 3). Melindungi pihak yang lemah agar jangan bertambah lemah, mencegah terjadi persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat dipilih dalam tiga kelompok. *Pertama*, kebijaksanaan yang secara tidak langsung mengarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat. *Kedua*, kebijaksanaan yang secara langsung

mengarah pada peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. dan *Ketiga*, kebijaksanaan khusus yang menjangkau masyarakat miskin melalui upaya khusus.

Pengukuran Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mengukur pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa Indikator sebagai berikut: Reputasi, Fokus Manajemen, Manajemen Pemberdayaan, Atmosfir, Kepemimpinan, Mengeluarkan kesanggupan manusia, Pengakuan dan Penghargaan, Inovasi, Kepercayaan, Teamwork, Pengambilan dan Pengendalian Keputusan, Komunikasi, Masyarakat, Struktur dan Prosedur, Tujuan Organisasi (Wilson, 1996:15-24).

Indikasi lain yang digunakan untuk mengukur pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Politik

Pemberdayaan politik bertujuan meningkatkan *bargaining position* yang diperintah terhadap pemerintah, seperti telah dikemukakan diatas. Melalui *bargaining* tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian, tanpa merugikan orang lain. Birokrasi yang berdaya tangguh adalah birokrasi yang memiliki QWL (*quality of work life*) atau kualitas kehidupan kerja yang tinggi dan berorientasi kepada (a) *participation in decision making* (keikutsertaan pada pembuatan keputusan), (b) *career development program* (program pengembangan karir), (c) *leadership style* (gaya kepemimpinan), (d) *the degrees of stress experienced by employees* (tingkat tekanan stres para pekerja), dan (e) *the culture of the organisation* (budaya organisasi). Utomo, (1998:32).

2. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan, pembayar resiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kambing hitam kegagalan program, dan penderita kerusakan lingkungan.

3. Pemberdayaan Sosial Budaya

Pemberdayaan sosial budaya bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*) dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.

4. Pemberdayaan Lingkungan

Pemberdayaan lingkungan dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya antara yang diperintah dan terhadap hubungan saling menguntungkan (Ndraha, 2003:80).

5. Latihan Ketrampilan

Untuk meningkatkan ketrampilan dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan. Melalui pendidikan dan pelatihan akan diperoleh sumber tenaga yang cakap dan terampil. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pemberian kesempatan

mengikuti pelatihan, seperti keterampilan memasak, salon, tata rias, menjahit, membuat kerajinan dari manik-manik dan pemanfaatan barang bekas.

Program ini juga dipersiapkan bagi tenaga usaha industri kecil guna menunjang kelancaran dan peningkatan usaha.

6. Kegiatan Berkelompok

Kegiatan berkelompok ini dilakukan dengan cara mengumpulkan individu-individu atau perempuan korban kekerasan yang telah selesai masalahnya untuk saling bertukar ketrampilan dan pengalaman hidup mereka sehingga saling menguatkan dan memberi semangat bagi yang lain. Mereka juga dapat bertukar pikiran dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kegiatan seperti ini dapat dijadikan sebagai alat untuk bertukar informasi tentang kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan bersama.

7. Sistem Pemasaran

Selain memberikan ketrampilan dan modal usaha, juga membantu memasarkan hasil produksi tersebut, misalnya melalui event pameran baik pada saat acara study banding dari daerah lain maupun pameran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, dijual dari kantor ke kantor, dan lain sebagainya. Selain itu, membantu melakukan promosi kepada pengusaha untuk memesan produk yang mereka hasilkan. Dari hasil penjualan tersebut, keuntungan yang diperoleh menjadi milik klien, setelah dipotong 10% untuk kas yang dijadikan sebagai tabungan bersama. Tabungan inilah yang rencananya akan digunakan sebagai keperluan bersama, misalnya pada saat klien membutuhkan uang, mereka dapat meminjam melalui tabungan tersebut.

Kebijakan Pengembangan Industri Kecil

Kebijakan pembinaan dan pengembangan industri kecil sesungguhnya sudah ada sejak pemerintah Orde Baru, adapun langkah besar dan sedang, telah dan dilakukan dalam kebijakan yang mengatur para pengusaha industri kecil. Sebagaimana yang diamatkan dalam PJPM dikatakan bahwa :”kemampuan dan peranan usaha kecil terus dikembangkan dengan meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana usaha disertai dengan pengembangan iklim yang mendukung, termasuk penyederhanaan perizinan penyediaan kemudian dalam melakukan investasi, memperoleh permodalan dan kesempatan usaha, juga kemudahan dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, dan bimbingan manajemen, serta alih teknologi.” (Irianto, 1999:12)

Dari komitmen pemerintah tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab pemerintah untuk kelangsungan hidup bagi pengusaha industri kecil. Adapun tindakan yang dilakukan untuk diwujudkan harapan tersebut, dapat ditempuh melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha
- 2) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana usaha yang mendukung pengembangan sektor usaha kecil

- 3) Mengembangkan iklim yang mendukung tumbuhnya sektor usaha kecil, yang mencakup
- 4) Penyederhanaan perijinan;
- 5) Kemudahan dalam melakukan investasi;
- 6) Kemudahan memperoleh permodalan;
- 7) Kemudahan dalam kesempatan usaha;
- 8) Kemudahan dalam memperoleh pendidikan, pelatihan, bimbingan manajemen, dan
- 9) Kemudahan dalam teknologi. (Irianto, 1996: 32)

Untuk mewujudkan akses (kemudahan) bagi pengusaha industri kecil, pemerintah telah berupaya melalui Dinas Perindustrian meluncurkan program-program pelatihan, misalnya pelatihan motivasi (dengan metode *Achievement Motivation Training* atau AMT yang bertujuan untuk membangkitkan etos kerja), teknik produksi, administrasi usaha, promosi pemasaran atau tatacara berkoperasi dan bahkan pemerintah berupaya memberikan perlindungan kepada pengusaha industri kecil, misalnya melalui Undang-Undang Usaha Kecil (Raharjo, 1999:59). Selanjutnya upaya pemerintah tersebut diwujudkan berupa penetapan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan antara lain tentang perlunya keberpihakan pemerintah dalam pengembangan usaha kecil dalam berbagai bentuk seperti kemitraan, permodalan, pemasaran, teknologi, pencadangan usaha dan sebagainya. Sehingga Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum bagi pengembangan usaha kecil yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk strategi dan langkah konkrit, yang dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian yang ditetapkan meliputi : Pelatihan keterampilan kepada pelaku usaha industri kecil, Pemberian modal usaha melalui kredit bergulir, Pembinaan yang dilakukan pada pelaku usaha kecil, dan Peran Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan industri kecil. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan Miles dan Huberman.

Pengembangan Industri Kecil melalui Pemberdayaan Masyarakat *Pelatihan Keterampilan Kepada Pelaku Usaha Industri Kecil*

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berimplikasi terhadap pengembangan usaha industri kecil di Kecamatan Tering. Karena pendidikan dan pelatihan selalu identik dengan bidang usahanya sehingga dengan mudah untuk diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Tindakan yang dilakukan Camat Tering dalam memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan merupakan tindakan yang tepat sehingga kontribusinya terhadap pelaku usaha industri kecil sangat jelas. Hanya saja tidak semua pelaku usaha mendapat kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan, karena

terbatasnya pelaku usaha yang mengikuti pelatihan maka tindakan yang dilakukan pemerintah Kecamatan Tering belum sepenuhnya dapat mendukung pengembangan usaha industri kecil.

Secara faktual pendidikan dan pelatihan tidak sekedar untuk membentuk sikap, dan perilaku serta kepribadian pelaku usaha industri kecil, tetapi dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian para pelaku usaha dalam mendukung pengembangan usaha.

Dengan demikian jika hasil temuan tersebut diklarifikasi dengan pendekatan teori yang dikemukakan Siswanto, (1998 : 139) bahwa salah satu jalan yang harus ditempuh oleh manajemen tenaga kerja dalam mendukung pengembangan usaha adalah keterampilan dan keahlian karena dengan memiliki keterampilan dan keahlian, dapat mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk berkembangnya usaha. Hanya saja perlu dipertimbangkan bentuk pendidikan dan pelatihan yang dinilai relevan untuk mendukung pengembangan usaha.

Pemberian Modal Usaha Melalui Kredit Bergulir

Penyaluran pinjaman modal kredit bergulir adalah suatu fasilitasi kredit secara simultan sebagai investasi yang disediakan untuk membantu usaha industri kecil sebagai modal kerja atau untuk membiayai usaha produktif. Yang secara implementatif diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 72 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis pelaksanaan program pinjaman modal kredit bergulir untuk pelaku usaha industri mikro, kecil dan menengah.

Ditinjau secara factual usaha industri kecil, di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, setiap tahunnya terus meningkat seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Meski demikian peningkatan tersebut belum signifikan. Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini secara akumulatif terjadi fluktuasi antara 4 – 6 %. Adapun perkembangan jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu mencapai 8 % dibanding pada tahun sebelumnya hanya mencapai 7 %, Meskipun mengalami perubahan tetapi perubahan tersebut belum sesuai yang diharapkan, dan seharusnya mengalami peningkatan yang lebih besar.

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa kurang berkembangnya para pelaku usaha industri kecil di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat, dikarenakan oleh terbatasnya modal kerja, sehingga kurang mampu bersaing dengan pelaku usaha industri kecil yang memang memiliki modal yang cukup. Terutama bagi para pelaku usaha yang mendapatkan suntikan modal usaha, mampu untuk mengembangkan usahanya.

Nampaknya yang dihadapi usaha industri kecil di Kecamatan Tering adalah terbentur masalah modal usaha, sementara penyaluran modal usaha melalui kresdit bergulir belum semua nya sampai kepada kelompok sasaran. Dengan demikian bagi para pelaku usaha industri kecil yang belum mendapatkan suntikan modal usaha sepertinya mengalami kendala bahkan tidak dapat berbuat banyak dalam mengembangkan usahanya.

Meski demikian secara aplikatif penyaluran modal usaha melalui kredit bergulir menunjukkan kontribusi yang berarti untuk menunjang pengembangan usaha industri kecil. Meskipun nilai pinjaman kredit bergulir relative kecil tetapi mempunyai nilai manfaat cukup berarti untuk menggerakkan hasil produksi. Berdasarkan kebijakan yang ditentukan untuk pelaku usaha kecil sebesar Rp. 5.000.000,- dan nilai terbesar hingga mencapai Rp. 75.000.000,- Adapun besar kecilnya pinjaman yang diberikan sangat tergantung pada nilai anggunan yang dijadikan sebagai jaminan. Meskipun besarnya bantuan yang digulirkan ke para pelaku usaha kecil bervariasi, tetapi ditinjau dari segi nilai manfaat sangat berarti untuk menunjang kelancaran / berkembangnya usaha yang dilakukan.

Pembinaan Industri Kecil

Dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah maka perlu diberikan pembinaan sesuai bidang usaha yang ditekuninya. Dalam hal pembinaan yang dilakukan pemerintah Kecamatan Tering belum sepenuhnya dapat terserap oleh pelaku usaha industri kecil di daerah tersebut. Dalam rangka memacu pelaku usaha industri kecil untuk lebih berkembang, maka pihak petugas kecamatan hendaknya dapat melakukan pembinaan sesuai bidang usahanya, baik yang dilakukan di wilayah kecamatan maupun di pemerintah kabupaten.

Dengan demikian pembinaan kepada pelaku usaha industri kecil secara faktual dapat meningkatkan keterampilan dan membentuk sikap dan perilaku para pelaku usaha industri kecil dalam upaya mengembangkan usahanya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moenir, (2004 : 219) bahwa pembinaan aparatur merupakan suatu tindakan yang diarahkan untuk mendapatkan kemajuan, peningkatan atau perbaikan atas sesuatu. Dengan demikian fakta diterima oleh teori, Oleh Karena itu cukup beralasan jika pembinaan bagi pelaku usaha industri kecil ditingkatkan, karena urgensinya pembinaan bagi para pelaku usaha industri kecil bukan sekedar untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian serta dapat membentuk pelaku usaha industri kecil tetapi dapat membentuk kepribadian para pelaku usaha industri memiliki agar memiliki jiwa interpreneur yaitu mempunyai semangat wirausaha dalam menangkap peluang yang lebih besar.

Peran Pemerintah Kabupaten dalam Pengembangan Industri Kecil

Peran Pemerintah kabupaten dalam mengembangkan industri kecil tercermin oleh beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Kutai Barat antara lain melalui Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 412.32/K/1147/2013 tentang Alokasi Modal Usaha Ekonomi Mikro di 8 (delapan) Wilayah Kabupaten Kutai Barat. Kemudian diperkuat dengan Keputusan bersama antara Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, dengan Bank Kaltim Cabang Melak, (MoU) Nomor 119/496/HK-TU.P/2007 dan Nomor 011/8-5/BPD-MLK/2007 tentang penyaluran modal kredit untuk usaha mikro.

Dalam rangka pengembangan industri kecil, maka secara implementatif melibatkan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD), antara lain Dinas

Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa (KPMD), dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Faktor-faktor yang Mendukung Pengembangan Industri Kecil Melalui Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tering meliputi :

- a. Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan disamping itu adanya kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sehingga pemerintah daerah beserta jajarannya memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya daerah untuk meningkatkan tarap hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.
- b. Surat Keputusan Kerjasama Bupati Kutai Barat dengan Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 052/26/ Pemkab-KB/VII/2004 dan 021/BPP-PTS/PRJ/VIII/2004 tentang kerjasama pelaksanaan pinjaman dana bergulir, dapat mendorong para pelaku usaha industri kecil untuk mengembangkan bidang usahanya
- c. Adanya komitmen yang kuat Bupati Kutai Barat beserta jajarannya untuk membangun perekonomian daerah melalui program pemberdayaan masyarakat yang diaplikasikan lewat penyaluran bantuan dana bergulir kepada usaha mikro/industri kecil dan koperasi.
- d. Kondusifnya stabilitas keamanan dan ketertiban Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat pengembangan industri kecil melalui pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan.
- e. Terciptanya iklim kerjasama yang baik antara instansi pemerintah dengan pengusaha industri kecil, sehingga ada peluang usaha industri kecil dapat berkembang.

Faktor-faktor yang Menghambat Pengembangan Industri Kecil Melalui Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tering meliputi :

- a. Terbatasnya sumber daya aparatur yang memiliki keterampilan dan keahlian dibidang industri dan perdagangan.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan industri kecil.
- c. Terbatasnya modal usaha dan modal kerja sehingga produksi yang dihasilkan kurang optimal bahkan kurang mampu mengikuti keinginan selera konsumen
- d. Tingginya biaya produksi dan operasional karena sebagian bahan yang diperlukan masih menggunakan bahan impor.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang dikemukakan diatas maka, penulis akan menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengembangan usaha industri kecil yang dilakukan melalui pemberdayaan di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat mampu membawa perubahan terhadap para pelaku usaha industri kecil Meskipun perubahan tersebut belum signifikan tetapi pemberdayaan yang dilakukan melalui Pelatihan keterampilan kepada pelaku usaha industri kecil, Pemberian modal usaha melalui kredit bergulir, dan Pembinaan yang dilakukan pada pelaku usaha kecil mampu meningkatkan dan para pelaku usaha industri kecil lebih berkembang..
2. Pengembangan usaha industri kecil di Kecamatan Tering tidak terlepas dari Peran pemerintah kabupaten. Peran tersebut tidak hanya berupa pemberian modal usaha tetapi juga keterlibatan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam memberikan pembinaan, serta pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pada para pelaku usaha industri kecil dalam rangka meningkatkan daya saing disegment pasar.
3. Kurang optimalnya dalam pengembangan usaha kecil di Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh terbatasnya tenaga yang terampil dibidang usahanya, terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan industri kecil, terbatasnya modal usaha dan modal kerja dan tingginya biaya produksi dan operasional karena sebagian bahan yang diperlukan masih menggunakan bahan impor

Saran-saran

Dari hasil kesimpulan sebagaimana yang dikemukakan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi aparatur yang profesional melalui pendidikan dan pelatihan, dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga pelatihan yang ada di Kabupaten / provinsi.
2. Menumbuhkan kesadaran aparatur yg terkait dalam melakukan pembinaan agar dalam menjalankan tugasnya sbg mediaswara lebih efektif
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian pelaku usaha industri kecil melalui berbagai jenis pelatihan
4. Menyelaraskan antara APBD dengan program pemberdayaan, sehingga secara aplikatif kegiatan yang berkenaan dengan pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Anonimus, Surat Keputusan Bupati Kutai Barat No. 031 /BPP-PTS/ PRJ / VI/ 2004 Pembentukan Kelompok Kerja Penyaluran Pinjaman Dana Bergulir, Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- Abimanyu, Anggito, 1995, *Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Rakyat*, PAU- SE UGM bersama BPFE, Yogyakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Pustaka Cidensindo, Jakarta.

- Miles, Matthew B. dan A. Michel Huberman. 1992 *Analisis Data Kualitatif*, Cetakan I, UI – Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mubyarto. 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Aditya Media, Yogyakarta.
- Mustofadidjaja. 2001. Seminar Nasional : *Penguatan Administrasi Publik Dalam Rangka Good Governance*. STIA LAN. Jakarta.
- Setiono, Yuli. 1997. *Upaya Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia*, Majalah Usahawan, Nomor 07 Th XXVI, Juli 1997, Jakarta.
- Tambunan, Tulus, TH., 2000, *Perekonomian Industri : Beberapa Isu Penting Ghallia Indonesia*, Jakarta
- Unggul, 2001, *“Pemberdayaan Pengusaha Kecil di Perkotaan” : Suatu Studi Pemberdayaan Pengusaha Industri Kecil Keramik di Dinoyo Malang*, Tesis Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.